

Timur Laut: Sebuah Pembelajaran Bagi Negara Berkembang

Article

Keberhasilan Bantuan Luar Negeri di Asia Timur Laut: Sebuah Pembelajaran Bagi Negara BerkembangArdila Putri¹, Silvia Dian A², Radika Ayu A³^{1,2,3}*Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pertamina, Jakarta, Indonesia*

SUBMISSION TRACK

Received : 15 February 2020

Final Revision : 01 May 2020

Available Online : 30 May 2020

KEYWORD

North East Asia, Foreign Aid, South Korea, Taiwan, Japan, China

KATA KUNCI

Asia Timur Laut, Bantuan Luar negeri, Korea Selatan, Tiongkok, Taiwan, Jepang

CORRESPONDENCE

E-mail : ardila.putri@universitaspertamina.ac.id
silvia.da@universitaspertamina.ac.id

A B S T R A C T

After the second world war, Northeast Asian countries such as Japan, South Korea, China and Taiwan, were recipient countries of foreign aid. Then, the countries changed its status from the recipient countries to the donor countries. This paper aims to explain the factors that led to the success of Northeast Asian countries to change their status from foreign aid recipient to foreign aid providers. This research departs from the tradition of empiricism and is a qualitative research using descriptive-analytical methods. This research shows that good governance, the close relations between donor countries and recipient countries, as well as huge investments in infrastructure and human resources are the key to the success of foreign aid in Northeast Asian countries. This study concludes that the country's enormous role (ownership) in the management of foreign aid is the most influencing factor.

A B S T R A K

Paska perang dunia kedua, negara-negara Asia Timur Laut seperti Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, dan Taiwan, merupakan negara penerima bantuan luar negeri. Kemudian, negara tersebut berubah status dari negara penerima bantuan luar negeri menjadi negara pemberi bantuan luar negeri (negara donor). Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan negara-negara Asia Timur Laut berubah status dari negara penerima menjadi negara pemberi bantuan luar negeri. Penelitian ini berangkat dari tradisi empirisme dan merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola yang baik, kedekatan hubungan antara negara donor dan negara penerima, juga investasi yang sangat besar di bidang infrastruktur dan sumber daya manusia adalah kunci dari kesuksesan bantuan luar negeri di negara-negara Asia Timur Laut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran negara yang sangat besar dalam manajemen bantuan luar negeri adalah faktor yang paling mempengaruhi.

Pendahuluan

Paska perang dunia kedua, negara-negara di kawasan Asia-Timur Laut, seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Tiongkok merupakan negara penerima bantuan luar negeri terutama dari Amerika Serikat (AS), Bank Dunia, dan PBB. Pada tahun 1945-1953 Jepang menerima bantuan luar negeri untuk membantu pemulihan kondisi negara tersebut setelah perang. Tak berbeda jauh dengan Jepang, paska perang dunia kedua hingga awal 1990an, Korea Selatan menerima bantuan luar negeri hingga 12.7 juta dolar Amerika. Bahkan pada saat perang Korea (1950-1953), sebagian besar investasi, biaya kebutuhan pemerintah baik untuk menjalankan pemerintahan maupun untuk membeli alutsista sebagian besar berasal dari bantuan luar negeri. Hal yang sama juga dialami Taiwan, sebagai salah satu penerima bantuan luar negeri terbesar sekaligus sekutu AS di Asia. Tiongkok juga mulai membuka diri terhadap bantuan luar negeri dari negara-negara barat paska kebijakan *open up policy* yang dicanangkan paska 1970an.¹

Walaupun pada awalnya, negara-negara di Asia Timur adalah penerima bantuan luar negeri terbesar, paska tahun 1970-an negara-negara ini beralih dari penerima bantuan luar negeri menjadi negara yang memberikan bantuan luar negeri. Jepang merupakan negara Asia Timur Laut pertama yang berubah statusnya dari penerima bantuan luar negeri menjadi pemberi bantuan luar negeri. Paska tahun 1955, Jepang mulai menjadi negara pemberi bantuan luar negeri dalam skema pembayaran utang. Negara tersebut juga menjadi salah satu pendiri *Development Assistance Committee* (DAC) yaitu forum anggota *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) untuk mendiskusikan isu-isu terkait bantuan luar negeri bagi negara

berkembang. Hingga akhirnya di tahun 1990-an Jepang menjadi negara donor bantuan luar negeri terbesar di dunia.

Sama halnya dengan Jepang, pada tahun 1975 Korea Selatan dihapus dari daftar negara berkembang dan dimasukkan kedalam daftar negara industri baru. Kemudian di tahun 1995, Bank Dunia menghapus Korea Selatan dari daftar negara penerima bantuan luar negeri dan mengubah statusnya dari penerima bantuan luar negeri menjadi pemberi bantuan luar negeri. Hingga pada tahun 2010, Korea Selatan menjadi anggota DAC menyusul Jepang.

Tak berbeda jauh, Taiwan juga merupakan wilayah yang pada awalnya merupakan salah satu penerima bantuan luar negeri terbanyak di Asia. Kemudian di era 1970-an negara ini memiliki perkembangan ekonomi yang sangat pesat dan masuk menjadi 20 negara dengan pendapatan tertinggi di dunia dan mulai terlibat aktif sebagai salah satu pemberi bantuan luar negeri.

Negara terakhir yang akan dibahas yaitu Tiongkok yang saat ini muncul sebagai salah satu *emerging donor* dan merupakan negara dengan perekonomian nomor 2 terbesar di dunia. Dulunya Tiongkok merupakan negara penerima bantuan luar negeri, baik itu dari Uni Soviet saat pemerintahan Mao Zedong, maupun dari negara-negara OECD dan berbagai lembaga multilateral paska kebijakan *open up policy* yang dijalankan oleh Deng Xiaoping.²

Fenomena perubahan status dari penerima bantuan negeri menjadi pemberi bantuan luar negeri yang dilakukan oleh negara-negara Asia Timur Laut telah menarik banyak peneliti untuk membahas fenomena ini. Eun Mee Kim dan Barbara Steeling berkontribusi dalam memberikan pemahaman baru mengenai nilai-nilai yang dimiliki oleh negara-negara donor dari Asia Timur yang memiliki perbedaan nilai

¹ Barbara Stallings and Eun Mee Kim, *Promoting Development: The Political Economy of East Asian Foreign Aid* (Singapore: Palgrave Macmillan, 2017) 12-16

² Barbara Stallings and Eun Mee Kim, 12-16

dengan negara barat. Kemudian dalam beberapa tulisan lainnya Eun Mee Kim juga telah menjelaskan fenomena keberhasilan Korea Selatan berubah status dari negara penerima bantuan luar negeri menjadi negara pemberi bantuan negeri.³ Hal yang sama juga telah dijelaskan Furuoka dalam tulisannya yang membahas tentang transformasi kebijakan bantuan luar negeri Jepang.⁴ Keberhasilan bantuan luar negeri dalam pembangunan Tiongkok telah dibahas oleh Zhou.⁵ Chan juga telah membahas tentang kemunculan Taiwan sebagai salah satu pemberi bantuan luar negeri patut untuk dikaji, mengingat selama ini kajian mengenai bantuan luar negeri lebih banyak fokus untuk menemukan penyebab kegagalan bantuan luar negeri.⁶

Dari beberapa literatur yang membahas bantuan luar negeri di Asia Timur Laut, masih sedikit literatur yang mencoba untuk membahas keberhasilan bantuan luar negeri dengan membandingkan beberapa kasus sekaligus. Padahal, dengan membandingkan pola-pola yang terjadi di beberapa negara, kita dapat menarik kesimpulan yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor penyebab keberhasilan bantuan luar negeri. Dengan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan bantuan luar negeri di Asia Timur Laut yang pada awalnya merupakan negara berkembang, maka kita dapat menarik pembelajaran

yang dapat diterapkan bagi negara-negara berkembang lainnya termasuk Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengisi celah ini dan berkontribusi untuk mengembangkan lebih jauh tentang kajian bantuan luar negeri pada umumnya dan Asia Timur pada khususnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan tradisi empirisme yaitu penelitian dengan tujuan untuk menjelaskan sebuah fenomena berdasarkan hasil observasi. Observasi yang dilakukan adalah observasi tidak langsung dimana peneliti memanfaatkan data sekunder dari penelitian-penelitian terdahulu. Data ini dikumpulkan dan dianalisa menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang bersangkutan melalui interpretasi terhadap data yang dikumpulkan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran di internet terutama melalui *google scholars* dengan kata kunci diantaranya: *North-East Asia Foreign Aid, US aid to North-East Asia after WW II, Japan Foreign Aid, South Korea Foreign Aid, Taiwan Foreign Aid, China Foreign Aid*. Data-data yang dikumpulkan berupa artikel yang diterbitkan di jurnal *peer review* juga buku-buku yang ditulis oleh ahli bantuan luar negeri terutama ahli Asia Timur. Data-data tersebut dapat dilihat di bagian daftar pustaka tulisan ini. Setelah melakukan studi literatur dengan mekanisme triangulasi data dan menyimpulkan faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan perubahan status masing-masing negara Asia Timur, penulis kemudian membandingkan masing-masing kasus dan menarik kesimpulan dari perbandingan tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Jepang dari Negara Kalah Perang hingga Menjadi Negara Donor Terbesar

Paska Perang Dunia kedua, Jepang menderita kalah perang yang menyebabkan

³ Eun Mee Kim and Jihwan Oh, "Determinants of Foreign Aid: The Case of South Korea," *Journal of East Asian Studies*. Volume 12, Issue 2 May 2012, 251-274

⁴ Fumitaka Furuoka, Mikio Oishi, and Iwao Kato, "From Aid Recipient to Aid Donor. Tracing the Historical Transformation of Japan's Foreign Aid Policy," *Electronic Journal of Contemporary Japanese Studies*. Article 3 in 2010. <<http://japanesestudies.org.uk/articles/2010/FuruokaOishiKato.html#About%20the%20Author>> diakses pada 13 Januari 2020

⁵ Hong Zhou, Jun Zhang, and Min Zhang, *Foreign Aid in China* (New York: Springer, 2015)

⁶ Gerald Chan, "Taiwan as an Emerging Foreign Aid Donor: Developments, Problems, and Prospects," *Pacific Affairs* 70, no. 1 (1997): 37-56

terjadinya krisis ekonomi di negara tersebut. Paska perang di tahun 1945, beberapa industri strategis Jepang mengalami penurunan drastis. Jika dibandingkan dengan total produksi sebelum perang, industri manufaktur menurun hingga hanya mampu memproduksi 1/10, produksi tekstil hanya 1/5, dan industri makanan hanya mampu memproduksi 1/4.⁷

Akibat kalah perang, pada tahun 1945 hingga 1952 Jepang berada di bawah kontrol AS. Berdasarkan amanat perjanjian Jenewa, AS memberikan bantuan luar negeri kepada Jepang untuk membantu proses rekonstruksi paska perang. Jepang menerima sekitar 5 milyar dolar Amerika dari *The Government Aid and Relief in Occupied Areas Fund* (GARIOA) dan *Economic Rehabilitation in Occupied Areas Fund* (EROA). Dana dari GARIOA digunakan untuk membiayai kebutuhan dasar sehari-hari. Sedangkan pendanaan dari EROA digunakan untuk pembiayaan impor kebutuhan industri dalam negeri Jepang. Pemerintah AS melalui GARIOA juga memberikan beasiswa kepada mahasiswa Jepang untuk melanjutkan studinya ke Amerika Serikat.⁸

Selain dari pemerintah AS, Jepang juga menerima bantuan luar negeri yang cukup signifikan dari organisasi internasional seperti Bank Dunia dan PBB. Dari tahun 1953 hingga 1966, Bank Dunia memberikan bantuan sekitar 860 juta dollar AS untuk 34 proyek pembangunan di Jepang. Pendanaan dari Bank dunia digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan industri strategis yang dimiliki Jepang. Selama tahun 1960-an, Jepang merupakan penerima bantuan luar negeri nomor dua terbesar dari Bank Dunia. Hingga akhirnya pada tahun 1990, negara ini mampu

membayar seluruh hutangnya kepada Bank Dunia. PBB juga ikut berkontribusi untuk memberikan bantuan luar bagi Jepang melalui *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) dan *Cooperative for Assistance and Relief Everywhere* (CARE). Dari tahun 1949 hingga 1962, Jepang menerima 18 juta dollar AS dari UNICEF. Sedangkan CARE semenjak tahun 1948 mulai memberikan bantuan makanan dan obat-obatan bagi anak-anak Jepang.⁹

Jepang secara efektif menggunakan bantuan luar negeri tidak hanya untuk menyelesaikan permasalahan kelaparan dan kemiskinan akibat perang saja, melainkan negara ini juga memprioritaskan bantuan luar negeri untuk digunakan dalam restorasi dan rehabilitasi ekonominya. Sebagian besar bantuan luar negeri digunakan untuk pembangunan fisik. Bantuan luar negeri digunakan untuk mengimplementasikan pembangunan infrastruktur seperti sistem transportasi dan pembangkit listrik, juga untuk pembiayaan industri strategis seperti kendaraan bermotor, baja, dan perkapalan. Langkah inilah yang pada akhirnya mendorong keberhasilan ekonomi Jepang pada tahun 1960an dan 1970an.¹⁰ Kepiawaian pemerintah Jepang dalam mengalokasikan pendanaan bantuan luar negeri ini menunjukkan bahwa pembuat kebijakan di Jepang memiliki rencana dan strategi yang matang untuk rekonstruksi paska perang dan pembangunan ekonomi negaranya.

Jepang pada tahun 1945 hingga 1950 memiliki hubungan yang sangat dekat dengan AS sebagai negara donor. AS dan organisasi internasional seperti Bank Dunia dan PBB pun banyak turut serta dalam manajemen rekonstruksi paska perang Jepang. Walaupun begitu, pemerintah maupun masyarakat Jepang memiliki

⁷ Starling and Kim, *The Political Economy*, 29

⁸ Furuoka, *From Aid Recipient to Aid Donor*, <<https://www.japanesestudies.org.uk/articles/2010/FuruokaOishiKato.html>> diakses pada 13 Januari 2020

⁹ Starling and Kim, *The Political Economy*, 29

¹⁰ Furuoka, *From Aid Recipient to Aid Donor*, <<https://www.japanesestudies.org.uk/articles/2010/FuruokaOishiKato.html>> diakses pada 13 Januari 2020

kepercayaan bahwa rekonstruksi paska perang adalah tanggung jawab mereka. Sehingga mereka dengan proaktif terus berusaha semaksimal mungkin untuk memainkan peran sentralnya dalam pembangunan. Hingga Jepang dikenal dengan filosofi *selfhelp* (membantu diri sendiri) dalam manajemen bantuan luar negerinya. Filosofi ini jugalah yang nanti pada akhirnya dikembangkan Jepang saat negara ini menjadi salah satu donor terbear bantuan luar negeri.¹¹

Paska tahun 1950, Jepang bebas dari pendudukan AS paska perjanjian Jenewa. Melalui perjanjian San Fransisko, AS mengumumkan bahwa Jepang harus melakukan pembayaran atas bantuan luar negeri yang diberikan sebelumnya. Meskipun sempat terjadi perdebatan metode pembayaran yang tepat, pada akhirnya diputuskan Jepang akan melakukan pembayaran dalam dua bentuk. Pertama langsung membayar kepada negara dan Organisasi Internasional yang memberikan bantuan. Sedangkan metode kedua, dengan menyalurkan bantuan luar negeri untuk negara lainnya terutama negara yang ada di kawasan Asia Timur baik Timur Laut maupun Tenggara. Kewajiban membayar hutang inilah yang pada awalnya menjadi titik awal berubahnya status Jepang dari negara penerima menjadi negara pemberi bantuan luar negeri.¹²

Kemudian, pada tahun 1960, Jepang menjadi anggota *Development Assistance Group* (DAG) yang beranggotakan negara-negara donor bantuan luar negeri. Di waktu yang berdekatan Jepang juga mendirikan Bank Pembangunan Asia/*Asian Development Bank* (ADB). Hingga akhirnya pada tahun 1989, Jepang menjadi negara penyumbang bantuan luar negeri terbesar mengalahkan AS yang turun ke

posisi kedua. Hal ini membuktikan bahwa ada pergeseran status Jepang dari negara penerima menjadi negara pemberi bantuan luar negeri.¹³

Keberhasilan Bantuan Luar Negeri Dalam Mengembangkan Pembangunan di Korea Selatan

Paska Perang Dunia kedua, Korea Selatan sangat bergantung pada bantuan luar negeri dari negara donor terutama AS dan Jepang. Saat itu, bantuan luar negeri merupakan sumber investasi terbesar Korea Selatan. Tercatat pada tahun 1953 hingga 1971, Korea Selatan menerima bantuan luar negeri sebesar 3.6 juta dimana bantuan luar negeri merupakan 45% dari total keseluruhan impor Korea Selatan, setara 3.5% GDP, dan merupakan sumber investasi terbesar Korea Selatan (lebih dari 50%). Pendanaan ini sebagian besar berasal dari donor bilateral (92.4%) dimana 90% donor utama berasal dari AS dan Jepang.¹⁴

Sebagai wilayah yang menjadi daerah pertarungan dua ideologi besar dunia paska perang dunia kedua, Korea menjadi tempat untuk menunjukkan eksistensi masing-masing kubu. Bagi AS, Korea Selatan adalah tempat untuk menunjukkan keberhasilan sistem pasar bebas. Sehingga AS sangat mendorong dan mendukung perkembangan Korea Selatan baik itu dibidang militer, politik, ekonomi, maupun sosial. Salah satu bidang yang menjadi fokus utama AS adalah membantu mengatur bantuan luar negeri agar bisa digunakan untuk proses rekonstruksi Korea Selatan paska perang 1948. Selain itu, pada 1965, Jepang mulai memberikan bantuan luar negeri kepada Korea Selatan sebagai salah satu mekanisme instalmen pembayaran hutang Jepang terhadap AS dan berbagai organisasi internasional. Kedekatan geografis dan kisah masa lalu

¹¹ Starling and Kim, *The Political Economy*, 29

¹² Furuoka, *From Aid Recipient to Aid Donor*, <<https://www.japanesestudies.org.uk/articles/2010/FuruokaOishiKato.html>> diakses pada 13 Januari 2020

¹³ Furuoka, *From Aid Recipient to Aid Donor*, <<https://www.japanesestudies.org.uk/articles/2010/FuruokaOishiKato.html>> diakses pada 13 Januari 2020

¹⁴ Starling and Kim, *The Political Economy*, 83

sebagai negara bekas perang juga keinginan membangun hubungan baik kembali, membuat Jepang proaktif sebagai salah satu donor bagi Korea Selatan dan hubungan keduanya mulai membaik dari waktu ke waktu.¹⁵

Walaupun peran AS dan Jepang sangat besar untuk membantu Korea Selatan dalam manajemen bantuan luar negeri, peran pemerintah Korea Selatan sendiripun sangatlah besar. Pada tahun 1949, Korea Selatan menerima bantuan luar negeri dari pemerintah Amerika Serikat melalui the *Economic Cooperation Administration* (ECA). Saat itu pemerintah Korea Selatan langsung mendirikan sebuah lembaga perencanaan dan pengadaan dengan tugas utama untuk mengatur bantuan luar negeri. Awalnya lembaga ini berada di bawah koordinasi Perdana Menteri dan kemudian dialihkan di bawah koordinasi Presiden. Hal ini menunjukkan keseriusan negara untuk mengatur bantuan luar negeri, dimana badan yang mengatur bantuan luar negeri berada langsung dibawah koordinasi otoritas tertinggi.¹⁶

Lebih lanjut, pemerintah Korea Selatan berusaha untuk menjadi aktor utama dalam manajemen bantuan luar negeri yang diterimanya. Mereka selalu berusaha agar bantuan luar negeri sesuai dengan agenda dan konsep rencana pembangunan yang mereka rancang walaupun hal itu tidak sesuai dengan arahan negara donor. Korea Selatan mengusahakan agar bantuan luar negeri tidak hanya dialokasikan untuk pemberantasan kelaparan dan pengentasan kemiskinan, melainkan juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah Korea Selatan juga mulai

memanfaatkan berbagai sumber pendanaan bantuan luar negeri sehingga bantuan luar negeri yang masuk ke Korea Selatan yang awalnya berbentuk bilateral menjadi multilateral. Hal ini terlihat dari mulai terlibatnya PBB dan Bank Dunia sebagai lembaga donor bagi Korea Selatan.¹⁷

Pada tahun 1962, di bawah pemerintahan presiden Park Chung-hee, Korea Selatan meluncurkan rencana pembangunan lima tahun (1962-1966). Pada era ini, pemerintah Korea Selatan mulai melakukan perubahan terhadap kebijakan bantuan luar negeri yang mereka terima. Jika pada tahun-tahun awal Korea Selatan lebih banyak menerima bantuan luar negeri dalam bentuk bantuan kemanusiaan, maka pada tahun 1960an mulai diubah ke arah bantuan pembangunan. Pemerintah mulai menerapkan kebijakan *developmental state* yang terbukti telah membawa Jepang menjadi negara yang kembali bangkit setelah kalah perang. Korea Selatan memanfaatkan investasi yang besar dibidang infrastruktur dan industri strategisnya. Kebijakan pembangunan dan ekonomi ditujukan untuk mencapai kemandirian ekonomi dan menaikkan ekspor. Investasi Korea Selatan juga ditujukan untuk menggerakkan UMKM dan pembangunan sumber daya manusia. Pada era presiden Park ini sangat terlihat jelas peran negara dan pemerintah dalam menggerakkan ekonomi dan pembangunan.¹⁸

Dengan tata kelola yang baik, Korea Selatan berhasil mengelola bantuan luar negeri yang diterimanya sehingga meningkatkan kepercayaan negara donor untuk terus memberikan bantuan luar negeri. AS di bawah kepemimpinan Presiden Kennedy memutuskan bahwa skema bantuan luar negeri untuk Korea

¹⁵ Eun Mee Kim and Jinhwan Oh, "Determinants of Foreign Aid: The Case of South Korea" *Journal of East Asian Studies*. Volume 12, Issue 2 May 2012

¹⁶ Eun Mee Kim, Pil Ho Kim, and Jinkyung Kim. "From Development To Development Cooperation: Foreign Aid, Country Ownership, and the Developmental State in South Korea," *The Pacific Review* 26, 3 (2013) 313-336. DOI: 10.1080/09512748.2012.759263

¹⁷ Jiyoung Kim, "Foreign Aid and Economic Development: The Success Story of South Korea," *Pacific Focus: Inha Journal of International Studies* 26, Issue2 (August 2011) 260-286

¹⁸ Kim, Determinant, 251-274

Selatan diubah dari hibah menjadi pinjaman bersyarat. Pada tahun 1961-1975 pinjaman bersyarat untuk Korea Selatan mencapai 49.3% dari total bantuan luar negeri yang diterimanya. Walaupun masih menerima bantuan luar negeri, pada tahun 1963 Korea Selatan mulai terlibat sebagai donor bantuan luar negeri bersama Amerika Serikat. Pada tahun 1975 GNP Korea Selatan mencapai 574 dolar AS sehingga Bank Dunia menilai bahwa Korsel sudah tidak bisa lagi dikategorikan sebagai negara berpendapatan rendah sehingga tidak berhak menerima bantuan luar negeri bagi negara berkembang.¹⁹

Paska 1980an, Korsel mulai aktif sebagai salah satu negara pemberi bantuan luar negeri. Pada tahun 1987, Korea Selatan mendirikan *Economic Development Cooperation Fund* (EDCF) untuk mengurus bantuan luar negeri dengan skema pinjaman bersyarat. Lebih lanjut, pada tahun 1991 Korea Selatan mendirikan *Korea International Cooperation Agency* (KOICA) untuk mengurus bantuan luar negeri dan hingga kini lembaga ini menjadi ujung tombak yang mengurus bantuan luar negeri Korea Selatan ke berbagai negara. Akhir tahun 1995, Korea Selatan berhasil membayar seluruh hutangnya pada Bank Dunia dan pada tahun 2010 menjadi anggota *Development Assistance Committee* (DAC) yang merupakan forum anggota *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) untuk mendiskusikan isu-isu terkait bantuan luar negeri bagi negara berkembang.²⁰

Taiwan Dalam Ketidakpastian Status Internasional

Paska Perang Dunia kedua, *Republic of China* (ROC) yang saat itu masih menduduki wilayah Tiongkok daratan menjadi salah satu mitra strategis AS dan mendapatkan bantuan luar negeri yang sangat besar dari negara tersebut. Pada

April 1948, AS mengesahkan *Economic Cooperation Act*. Berdasarkan kebijakan tersebut, AS mendirikan *Economic Cooperation Administration* (ECA) yang langsung berada di bawah perintah presiden. ECA bertugas untuk menjalankan misi dan mengawasi bantuan luar negeri AS. AS dan ROC menyetujui *Economic Aid Agreement* pada Juli 1948 di Nanjing. AS setuju untuk membantu ROC memperkuat kekuatan militer dan ekonominya melalui pemberian hibah dan hutang. Setelah perjanjian ini, ECA mendirikan *ECA Mission to China* dan pemerintah ROC mendirikan *Council for US Aid* (CUSA) sebagai lembaga koordinasi untuk menjalankan mandat perjanjian tersebut. Saat itu, AS memberikan 10 juta dolar untuk pembangunan ekonomi ROC. Bantuan pertama AS ini digunakan untuk membangun kembali perusahaan gula, administrasi kereta api, dan perusahaan listrik. Sayangnya, setelah perjanjian tersebut, ROC kalah dalam perang sipil Cina sehingga AS membatalkan kesepakatan.²¹

Setelah pemerintahan ROC pindah ke Taiwan pada 1949 dan kemudian terjadinya Perang Korea, maka AS memanfaatkan Taiwan sebagai salah satu wilayah untuk menangkal ideologi komunisme. Sepanjang tahun 1950-1967 bantuan luar negeri AS untuk Taiwan mencapai 4 miliar dolar AS, 90% berbentuk hibah dan 10% berbentuk hutang dengan peruntukan sebesar 60% untuk militer dan 40% untuk bantuan ekonomi. Bantuan luar negeri AS mencakup 12% dari GDP Taiwan saat itu. Jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya pada tahun 1946-1959, Taiwan merupakan wilayah penerima bantuan perkapita luar negeri AS terbanyak dibandingkan 14 negara lainnya seperti Korea Selatan, Vietnam Selatan, Laos, Filipina, Kamboja,

¹⁹ Starling and Kim, *The Political Economy*, 83-85

²⁰ Starling and Kim, *The Political Economy*, 86-87

²¹ Wei-chen Lee and I-min Chang, "US Aid and Taiwan," *Asian Review of World Histories* 2, no 1 (January 2014) 49

Jepang, Thailand, Pakistan, Sri Lanka, Burma, India, Indonesia, Malaysia, dan Nepal.²²

Selain AS, Jepang juga merupakan pihak yang aktif dalam memberikan bantuan luar negeri terhadap Taiwan. Taiwan berada di bawah pendudukan Jepang selama 50 tahun, hingga akhirnya pada tahun 1945 Jepang dikuasai oleh ROC. Paska Perang Dunia kedua, tepatnya pada tahun 1965, setelah AS menghentikan bantuan luar negerinya, maka Jepang menjadi donor terbesar Taiwan. Jepang membantu Taiwan dengan menyediakan mesin dan peralatan lainnya yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi. Bantuan Jepang ini berkontribusi besar dalam mendukung Rencana Pembangunan 4 tahun (1965-1968) yang dicanangkan oleh pemerintah Taiwan. Pada tahun-tahun ini, banyak dari perusahaan Jepang yang memindahkan lokasi produksinya ke Taiwan dengan pertimbangan tersedianya lahan dan tenaga kerja terampil yang banyak.²³

Walaupun AS dan Jepang memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi Taiwan, pemerintah Taiwan sendiripun juga aktif dalam pembangunan ekonomi. Paska pindahnya pemerintahan ROC ke Taiwan, pemerintah mengeluarkan kebijakan reforma agraria yang dianggap sebagai salah satu reformasi agraria paling sukses di Asia. Lebih lanjut, pada tahun 1953, Taiwan meluncurkan rencana pembangunan empat tahun pertamanya. Pada tahun 1953-1956, Taiwan mencanangkan untuk pengembangan pertanian dan industri konsumen. Kemudian rencana ini dilanjutkan dalam rencana pembangunan empat tahun kedua dari tahun 1957-1960 dengan menitik beratkan pada pengembangan sumber daya alam, peningkatan ekspor, dan penyediaan tenaga kerja. Kebijakan rencana pembangunan 4 tahun ini terus berlanjut dan bantuan luar

negeri merupakan salah satu sumber pendanaan dari rencana-rencana yang dijalankan pemerintah ini. Rencana pemerintah ROC menampakkan hasil yang sangat signifikan yang ditunjukkan dengan naiknya pendapatan perkapita Taiwan sehingga negara ini menjadi salah satu negara dengan cadangan perkapita tertinggi di Asia. Semenjak tahun 1970an Taiwan selalu mencatatkan surplus perdagangan dan secara finansial adalah salah satu negara yang kaya. Bahkan di era 1990an negara ini merupakan 20 negara dengan pendapatan perkapita tertinggi di dunia.²⁴

Kesuksesan perekonomian Taiwan paska 1970an bersamaan dengan kebijakan Tiongkok yang mulai membuka diri untuk berhubungan negara lain di kancah internasional. Hal ini pada akhirnya mulai menghambat langkah Taiwan dalam membangun hubungan luar negeri. Di tengah ketidakpastian status internasional ini, pada tahun 1988 Taiwan mendirikan *Overseas Economic Cooperation Development Fund* yang kemudian namanya diganti menjadi *International Economic Cooperation Development Fund* (IECDF). Lembaga ini bertugas untuk menjalankan dan mengawasi bantuan luar negeri Taiwan bagi berbagai wilayah di dunia.²⁵

Tiongkok Dari Negara Tertutup Hingga Menjadi Salah Satu Penerima Dan Pemberi Bantuan Luar Negeri Terbesar

Paska didirikannya *People's Republic of China* (PRC), pada tahun 1950an dan 1960an, Mao Zedong membangun kerja sama dengan Uni Soviet dan Korea Utara. Uni Soviet banyak memberikan bantuan luar negeri kepada Tiongkok dengan mengirimkan berbagai peralatan dan tenaga kerja terampil untuk membantu

²² Lee and Chang, 76-80

²³ Lee and Chang, 79-80

²⁴ Gerald Chan, "Taiwan as an Emerging Foreign Aid Donor: Developments, Problems, and Prospect" *Pacific Affairs* 70, no 1 (Spring 1997) 37-56

²⁵ Joel Atkinson, "Comparing Taiwan's Foreign Aid to Japan, South Korea, and DAC," *Journal of the Asia Pacific Economy* 22, no 2 (2017) 253-272

industrialisasi Tiongkok. Walaupun begitu, Tiongkok tidak puas dengan kerjasama ini dan berakhir pada memburuknya hubungan kedua negara.²⁶

Paska *rapprochement policy* AS pada tahun 1972, Tiongkok mulai membuka diri untuk menerima bantuan luar negeri dari berbagai negara dan organisasi internasional. Berdasarkan peraturan *Foreign Assistance Act of 1961*, AS tidak diperbolehkan memberikan bantuan luar negeri kepada China, sehingga AS tidak ikut serta dalam memberikan bantuan luar negeri kepada Tiongkok tapi mendorong negara mitra dan Organisasi Internasional untuk melakukannya. Setelah kebijakan *Reform and Opening Up* Tiongkok pada tahun 1978, Jepang dan Tiongkok menandatangani *Sino-Japanese Peace and Friendship Treaty*. Paska perjanjian tersebut, Jepang menjadi donor bantuan luar negeri terbesar bagi Tiongkok. Tercatat antara tahun 1980an hingga 2000an lebih dari separuh bantuan luar negeri yang diterima Tiongkok berasal dari Jepang.²⁷

Uni-Eropa, Bank Dunia, dan PBB juga merupakan donor bantuan luar negeri utama Tiongkok selain Jepang. Pada tahun 1979, Tiongkok menanda tangani *Standard Basic Assistance Agreement* dengan *United Nations Development Programme* (UNDP). Setelah penandatanganan perjanjian dengan Jepang dan PBB, Tiongkok mulai memanfaatkan bantuan luar negeri untuk pembangunan ekonominya. Awalnya bantuan luar negeri ini banyak dimanfaatkan untuk pengembangan teknologi pertanian dan berbagai industri strategis.²⁸

Tiongkok menjalankan moto *for us to decide, for our own use*, dimana Tiongkok hanya akan menerima bantuan luar negeri yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan digunakan untuk keperluan mereka. Tiongkok mendirikan divisi independen di

berbagai institusi pemerintahannya yang bertugas mengurus bantuan luar negeri dari negara donor. Divisi independen ini menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari dalam bekerja, proses pekerjaan dijalankan sesuai dengan ide dan cara-cara yang dilatih oleh negara donor, dan mengembangkan kapasitas pekerjaannya agar bisa beradaptasi dengan cepat terhadap kinerja dan manajemen ala negara Barat. Selain itu, Tiongkok memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengembangan Sumber Daya Manusia. Paska kebijakan terbuka, Tiongkok mengirim banyak personilnya keluar negeri untuk belajar ilmu-ilmu barat disamping juga mendorong negara donor untuk memberikan pelatihan terhadap masyarakat Tiongkok. Kemudian, Tiongkok juga mendorong negara-negara donor untuk memberikan bantuan luar negeri tidak hanya dibagian timur tapi juga di bagian tengah dan barat (*from east to the west*).²⁹

Paska kebijakan terbuka, Tiongkok terus mendapatkan banyak bantuan luar negeri. Tahun 1995 adalah tahun dimana jumlah bantuan luar negeri mencapai puncaknya dan kemudian jumlah ini mulai menurun setelah itu. Paska tahun 1995 ini Tiongkok kemudian mulai aktif kembali sebagai salah satu negara donor. Di era pemerintahan Mao, Tiongkok sempat menjadi salah satu negara donor terbesar dimana 3% dari GDP-nya disumbangkan ke negara-negara sahabat seperti Korea Utara maupun negara-negara yang ikut serta dalam perjanjian Konferensi Asia-Afrika. Tapi setelah kebijakan terbuka, Tiongkok mulai memprioritaskan pembangunan dalam negeri hingga akhirnya di tahun 1995 Tiongkok mulai kembali aktif sebagai negara donor dan kini menjadi salah satu negara pemberi bantuan luar negeri terbesar di dunia.³⁰

²⁶ Barbara Stallings and Eun Mee Kim, 119

²⁷ Barbara Stallings and Eun Mee Kim, 120

²⁸ Hong Zhou, Jun Zhang, Min Zhang. *Foreign Aid in China* (New York: Springer, 2015)

²⁹ Zhou, 20-23

³⁰ Barbara Stallings and Eun Mee Kim, 122

Analisis Faktor Keberhasilan Bantuan Luar Negeri di Negara Kawasan Timur Laut

Dari sejarah bantuan luar negeri masing-masing negara Asia Timur Laut di atas terdapat beberapa faktor yang mendorong perubahan status negara-negara di Asia Timur Laut dari negara penerima bantuan luar negeri menjadi pemberi bantuan luar negeri. Jepang sebagai negara pertama yang mengalami perubahan status adalah negara yang pada akhirnya juga menjadi model bagi negara-negara di kawasannya. Model “State Developmentalism” yang dikembangkan di Jepang juga diadopsi negara-negara Asia Timur laut lainnya dengan menyesuaikan dengan keadaan mereka masing-masing. Model *state developmentalism* ini pada akhirnya memperkuat peran negara dalam kehidupan publik termasuk dalam manajemen bantuan luar negeri.

Jika dilihat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing negara Asia Timur laut, terlihat jelas bahwa masing-masing negara mempunyai rencana strategis yang jelas tentang arah penggunaan bantuan luar negeri. Jepang dibawah arahan *Ministry of International Trade and Industry* (MITI) membangun hubungan dekat antara industri dan pemerintah untuk menunjang pengembangan ekonomi. Taiwan dan Korea Selatan secara berkesinambungan merumuskan kebijakan pembangunan 5 tahun. Tiongkok di bawah arahan Deng Xiaoping mempertahankan ideologi mereka namun di saat bersamaan membuka diri terhadap perekonomian pasar. Kebijakan yang dikeluarkan negara-negara ini memiliki kemiripan dimana mereka memprioritaskan pembangunan fisik (infrastruktur) dan sumber daya manusia. Walaupun pada awalnya bantuan luar negeri bukanlah diperuntukkan untuk tujuan tersebut, melainkan untuk tujuan rekonstruksi paska perang dan pengentasan kelaparan.

Selain itu, masing-masing negara Asia Timur Laut memiliki lembaga khusus yang mengurus bantuan luar negeri. Jepang melalui MITI mencanangkan penggunaan bantuan luar negeri untuk pembangunan perekonomian terutama dibidang infrastruktur dan sumber daya manusia. Hal yang sama juga terjadi dengan Korea Selatan dan Taiwan. Sedangkan Tiongkok walaupun tidak memiliki lembaga yang khusus mengurus bantuan luar negeri, tapi di setiap lembaga strategis terdapat divisi khusus yang mengurus bantuan luar negeri. Hal ini pada akhirnya menunjukkan keseriusan negara dalam manajemen luar negeri dengan tujuan mempercepat pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

Negara-negara Asia Timur adalah beberapa negara yang terdampak oleh Perang Dunia kedua dan Perang Dingin. Mereka berhasil bangkit salah satunya adalah karena kedekatan mereka dengan donor. Sebagai negara kalah perang, Jepang yang saat itu di bawah pendudukan AS menjalin kerjasama yang erat dengan AS. Hal yang sama juga terjadi dengan Korea Selatan yang saat itu sedang berkonflik dengan Korea Utara terkait dengan perbedaan ideologis. Sama halnya dengan Taiwan di bawah pemerintahan Chiang Kai-shek yang merupakan salah satu sekutu kuat AS di Asia. Walaupun Tiongkok bukanlah sekutu dekat AS, tapi kebijakan *open up policy* paska tahun 1970an membuka kembali hubungan harmonis Tiongkok dengan dunia barat terutama negara-negara donor sehingga terjadi koordinasi dan kolaborasi yang berkesinambungan dalam manajemen luar negeri.

Negara-negara Asia Timur membuka perekonomiannya terhadap pasar bebas dan dekat dengan pihak donor. Walaupun begitu, mereka tetap mempertahankan kedaulatannya dalam mengontrol bantuan luar negeri. Hal ini terlihat dengan nilai *selfhelp* yang dimiliki Jepang dan bagaimna Jepang tetap menjalankan strateginya ditengah tidak

setujunya AS sebagai salah satu donor. Tak berbeda jauh, Korea Selatan terutama dibawah pemerintahan presiden Park, menjalankan strategi mereka sendiri, walaupun terkadang berbeda dengan rencana yang awalnya dicanangkan oleh donor. Hal yang sama juga terjadi dengan Taiwan yang tetap berusaha untuk menunjukkan independensinya walaupun di saat yang bersamaan tetap mengusahakan hubungan yang harmonis dengan negara donor. Tiongkok adalah negara yang paling kuat menunjukkan independensi negaranya terhadap manajemen bantuan luar negeri. Melalui nilai *for us to decide, for our own use* China tetap mempertahankan strategi yang mereka miliki walaupun di saat yang bersamaan mengharapkan bantuan dari negara lain.

Tabel 1: Indikator Kesamaan Pengelolaan Bantuan Luar Negeri 4 Negara Asia Timur Laut

| Indikator | Negara | | | |
|--|--|---|--|---|
| | Jepang | Korea Selatan | Taiwan | Tiongkok |
| Prioritas Alokasi bantuan LN | Restorasi dan rehabilitasi ekonomi paska perang, pambangunan infrastruktur, pendanaan industri strategis, pemberantasan kelaparan dan pengentasan kemiskinan | Pembangunan infrastruktur, pemberantasan kelaparan dan pengentasan kemiskinan | Pengembangan industri strategis, pambangunan infrastruktur | Pengembangan teknologi pertanian (infrastruktur) dan industri strategis |
| Rencana Strategis yang Jelas dan Terukur dalam Pengelolaan | Filosofi <i>selfhelp</i> , penerapan kebijakan <i>developmental</i> | Rencana Pembangunan Lima Tahun, Penerapan kebijakan | Rencana Pembangunan Empat Tahun bertahap, | Motto " <i>for us to decide, for our own use</i> " |

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| Bantuan Luar Negeri | <i>state</i> | <i>n</i> | Kebijakan Reformasi Agraria | |
| Lembaga Khusus Pengelola Bantuan Luar Negeri | <i>Ministry of International Trade and Industry (MITI), Asian Development Bank (ADB)</i> | <i>Economic Development Cooperation Fund (EDCF), Korea International Cooperation Agency (KOICA)</i> | <i>Council for US Aid (CUSA), International Economic Cooperation Development Agency (IECDF)</i> | Divisi khusus yang mengelola bantuan luar negeri di setiap lembaga strategis |
| Kedekatan dengan Negara/Lembaga Donor | AS, Bank Dunia, PBB | AS, Jepang | AS, Jepang | Uni Soviet, Jepang, Uni Eropa, Bank Dunia, PBB |

Sumber: dikonstruksi oleh penulis dari berbagai referensi

Pembelajaran bagi Negara Berkembang dari Fenomena Keberhasilan Bantuan Luar Negeri Negara-Negara Asia Timur Laut

Negara-negara berkembang seperti Indonesia telah mencoba untuk menjalankan kebijakan *state developmentalism* seperti yang dijalankan oleh negara-negara Asia Timur Laut. Sayangnya hasil yang diharapkan belum seperti negara-negara Asia Timur Laut. Jika ditilik lebih jauh, budaya birokrasi antara Asia Timur Laut dengan negara-negara berkembang lainnya memiliki perbedaan terutama dalam hal keterbukaan pemerintah terkait penganggaran dan perhatian besar pemerintah dalam manajemen bantuan luar negeri. Jika memperhatikan empat negara yang dijelaskan dalam tulisan ini, terlihat jelas bahwa pemerintah masing-masing negara memberikan prioritas besar dalam manajemen luar negeri. Baik itu dengan menempatkan lembaga yang mengurus

bantuan luar negeri langsung di bawah kepala pemerintahan maupun dengan menempatkan divisi khusus disetiap lembaga untuk untuk mempermudah koordinasi.

Lebih lanjut, negara-negara di Asia Timur Laut berusaha untuk menghindari budaya korupsi dalam manajemen pemerintahan. Walaupun peran pemerintah dan negara sangat besar dalam manajemen bantuan luar negeri, tapi peruntukan bantuan luar negeri digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan bersama. Apalagi dengan budaya di Asia Timur yang cenderung malu saat melakukan kecurangan dan tidak profesional dalam pekerjaan. Budaya seperti ini perlu untuk dikembangkan di negara-negara berkembang. Pengembangan karakter dan kemampuan sumber daya manusia layak untuk menjadi prioritas di samping juga terus mendorong pembangunan infrastruktur untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Selain itu, negara berkembang juga perlu menentukan sektor-sektor prioritas yang harus dikembangkan. Berkaca dari negara-negara di Asia Timur, negara berkembang perlu untuk mengidentifikasi industri strategis dan membuat rencana kebijakan yang sesuai. Kemudian, negara berkembang dapat menggunakan pembiayaan bantuan luar negeri untuk membiayai sektor-sektor strategis tanpa mengurangi independensi negara dalam mengatur domestiknya.

Kesimpulan

Berdasarkan perbandingan empat negara yang telah dilakukan terlihat bahwa manajemen tata kelola yang baik adalah faktor penentu yang menyebabkan negara-negara Asia Timur Laut berubah status dari negara penerima menjadi negara pemberi bantuan luar negeri. Tata kelola yang baik ini termasuk besarnya peran negara dalam pengelolaan bantuan luar negeri dengan menciptakan stabilitas politik, tidak korupsi, dan kepemimpinan yang kuat.

Selain itu, faktor lain yang menyebabkan kesuksesan ini adalah hubungan yang sangat dekat antara negara donor dengan negara penerima. Juga peran aktif negara donor dalam mendampingi agar terciptanya tata kelola yang baik di sebuah negara. Selain itu, investasi yang sangat besar di bidang infrastruktur dan sumber daya manusia melalui bantuan luar negeri menjadi faktor lain yang menyebabkan keberhasilan bantuan luar negeri di negara-negara Asia Timur Laut.

Tulisan ini fokus membahas faktor-faktor yang mendorong keberhasilan bantuan luar negeri di negara-negara kawasan Asia Timur Laut melalui perbandingan 4 negara (Jepang, Korea Selatan, China, dan Taiwan). Walaupun begitu, tulisan ini belum membahas tentang karakteristik bantuan luar negeri negara-negara di Asia Timur Laut, sehingga kajian lebih lanjut mengenai karakteristik bantuan luar negeri negara-negara Asia Timur Laut perlu dilakukan. Selain itu, negara-negara Asia Timur Laut membuktikan bahwa model "Developmental State" berhasil mendorong tata kelola bantuan luar negeri untuk berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. Meskipun demikian, negara-negara berkembang yang mencoba mengadopsi sistem ini belum sepenuhnya berhasil layaknya negara Asia Timur Laut, sehingga perlu dikaji lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan model ini di beberapa negara berkembang termasuk Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Atkinson, Joel. "Comparing Taiwan's Foreign Aid to Japan, South Korea and DAC," *Journal of the Asia Pacific Economy* 22, no 2 (2017): 253-272. DOI: 10.1080/13547860.2016.1245926
- Atkinson, Joel. "The Real East Asian Aid Model: Development Assistance as an Instrument of Comprehensive Security in Japan, South Korea and Taiwan," *Development Policy Review* 36, 3 (2018): 265-284.
- Bräutigam, Deborah. "Aid 'With Chinese Characteristics': Chinese Foreign Aid and Development Finance Meet the OECD-DAC Aid Regime," *Journal of International Development* 23, Issue 5 (July 2011): 752-764 <https://doi.org/10.1002/jid.1798>
- Brazys, Samuel Rueckert and Krishna Chaitanya Vadlamannati. "Aid Curse with Chinese Characteristics? Chinese Development Flows and Economic Reforms," *SSRN Electronic Journal* (2018).
- Burghart, Sabine. "Ownership in East-Asian Aid Discourses," *Forum for Development Studies* 44, no 3 (2017): 401-427
- Chan, Gerald. "Taiwan as an Emerging Foreign Aid Donor: Developments, Problems, and Prospects." *Pacific Affairs* 70, no. 1 (1997): 37-56
- Chan, Gerald. "Taiwan as an Emerging Foreign Aid Donor: Developments, Problems, and Prospects" *Pacific Affairs* 70, No. 1 (Spring, 1997): 37-56. DOI: 10.2307/2761227
- Chin, Gregory T. "Rising States, Donors, BRICS and Beyond. China as a 'net donor': Tracking Dollars and Sense," *Cambridge Review of International Affairs* 25, Issue 4 (2012) <https://doi.org/10.1080/09557571.2012.744641>
- Cho, Jonghwa, et, al. "Evaluation and Future Tasks of the East Asian Development Model: Focusing on the Comparison with the Anglo-American Model," *SSRN Electronic Journal* (2011)
- Chun, Hong-Min, Lee, Heejin, and Munyi, Elijah N. "South Korea as an Emerging Donor: Challenges and Changes on Its Entering OECD/DAC." *Journal of International Development* 22, 6 (2010)
- Dreher, Axel and Andreas Fuchs. "Rogue Aid? An Empirical Analysis of China's Aid Allocation," *Canadian Journal of Economics* 8, Issue 3 (Agustus 2015): 988-1023. <https://doi.org/10.1111/caje.12166>.
- Furuoka, Fumitaka, Mikio Oishi, and Iwao Kato. "From Aid Recipient to Aid Donor. Tracing the Historical Transformation of Japan's Foreign Aid Policy," *Electronic Journal of Contemporary Japanese Studies*, Article 3 in 2010. <http://japanesestudies.org.uk/articles/2010/FuruokaOishiKato.html#About%20the%20Author>
- Jain, Purnendra. "Japan's Foreign Aid: Old And New Contests," *The Pacific Review* 29, no 1, (2016): 93-113, DOI: 10.1080/09512748.2015.1066415
- Jr, Robert M. Orr. "The Aid Factor in U.S.-Japan Relations," *Asian Survey* 28, no. 7 (July 1988):740-756. DOI: 10.2307/2644698
- Kang, Sung Jin, Hongshik Lee, and Bokyeong Park. "Does Korea follow Japan in foreign aid? Relationships between aid and foreign investment," *Japan and The World Economy* 23 no. 1 (Januari 2011):19-27. <https://doi.org/10.1016/j.japwor.2010.06.001>
- Kim, Eun Mee and Jae Eun Lee. "Busan and Beyond: South Korea And The Transition From Aid Effectiveness To Development Effectiveness," *Journal of International Development* 25, no 6 (2013) : 787-801.

- Ardila Putri, Silvia Dian A, Radika Ayu A | Keberhasilan Bantuan Luar Negeri di Asia Timur Laut: Sebuah Pembelajaran Bagi Negara Berkembang
- Kim, Eun Mee and Jinhwan Oh. "Determinants of Foreign Aid: The Case of South Korea," *Journal of East Asian Studies* 12, Issue 2 (May 2012): 251-274. DOI: <https://doi.org/10.1017/S1598240800007852>
- Kim, Eun Mee, and Lee, Jae-Eun. "South-South Development Cooperation: Humanitarian and Global or Merely National?" *International Development and Cooperation Review* 1, no 1 (2009): 67–108
- Kim, Eun Mee, Pil Ho Kim, and Jinkyung Kim. "From development to development cooperation: foreign aid, country ownership, and the developmental state in South Korea," *The Pacific Review* 26, no 3 (2013): 313-336, DOI: 10.1080/09512748.2012.759263
- Kim, Jiyoung. "Foreign Aid and Economic Development: The Success Story of South Korea," *Pacific Focus: Inha Journal of International Studies* 26, Issue 2 (August 2011): 260-286.
- Kim, Sung-Mi. "The Domestic Politics of International Development In South Korea: Stakeholders And Competing Policy Discourses," *The Pacific Review* 29, 1 (2016) : 67-91.
- Kim, Sung-Mi. "The Domestic Politics Of International Development In South Korea: Stakeholders And Competing Policy Discourses," *The Pacific Review* 29, no 1 (2016) : 67-91. DOI: 10.1080/09512748.2015.1076503
- Koo, Jeong Woo, and Kim, Daewook "World Society and Foreign Aid: Explaining Determinants of Korean ODA, 1989–2007." *Korean Journal of Sociology (in Korean)* 45, 1 (2011): 153–190.
- Kwon, Jene K. and Jung Mo Kang. *The East Asian Model of Economic Development*. *Asian-Pacific Economic Literature* 25, no 2 (2011) 116-130.
- Lee, Kye-woo, and Park, Gi-hoon. 2007. "An Evaluation of Korea's 20-Year ODA." *Korean Development Review* 29, 2. (Reprinted in *Korea Focus*, 2008)
- Lee, Wei-chen and I-min Chang. "US Aid and Taiwan," *Asian Review of World Histories* 2, no 1 (January 2014): 47-80 doi: <http://dx.doi.org/10.12773/arwh.2014.2.1.047>
- Liou, Kuotsai Tom. "Strategies and Lessons of China's Post-Mao Economic Development," *Review of Policy Research* 16, no 1 (1999): 183-208.
- Patterson, Dennis and Jangsup Choi. "Policy and Practice in Oda Disbursements: An Analysis of Changes in South Korea's Official Development Assistance," *Journal of East Asian Studies* 19, no 2 (2019) : 239-264.
- Patterson, Dennis and Jangsup Choi. "Policy and Practice in Oda Disbursements: An Analysis of Changes in South Korea's Official Development Assistance," *Journal of East Asian Studies* 1, no 26 (2019)
- Paul W. Kuznets, "An East Asian Model of Economic Development: Japan, Taiwan, And South Korea," *Economic Development and Cultural Change* 36, No. S3 (April, 1988): 11-43.
- Potter, D., and Van Belle, D. "News Coverage and Japanese Foreign Disaster Aid: A Comparative Example of Bureaucratic Responsiveness to the News Media." *International Relations of the Asia-Pacific* 9, 2 (2009): 295–315
- Rosser, Andrew and Czeslaw Tubilewicz. "Emerging Donors and New Contests Over Aid Policy In Pacific Asia," *The Pacific Review* 29, 1 (2016): 5-19. DOI: 10.1080/09512748.2015.1066413
- Soderberg, Marie. *The Business of Japanese Foreign Aid: Five Cases from Asia*. UK: Routledge, 1996.
- Stallings, Barbara and Eun Mee Kim. *Promoting Development: The Political Economy of East Asian Foreign Aid*. Singapore: Palgrave Macmillan, 2017.

- Ardila Putri, Silvia Dian A, Radika Ayu A | Keberhasilan Bantuan Luar Negeri di Asia Timur Laut: Sebuah Pembelajaran Bagi Negara Berkembang
- Tubilewicz, Czeslaw. "State Transformation and the Domestic Politics of Foreign Aid in Taiwan," *The Pacific Review* 29, 1 (2016): 45-66. DOI: 10.1080/09512748.2015.1066412
- Tuman, J. P., Strand, J. R., and Emmert, C. "The Disbursement Pattern of Japanese Foreign Aid: A Reappraisal." *Journal of East Asian Studies* 9, 2 (2009) : 219–248.
- Varrall, Merriden. "Domestic Actors and Agendas in Chinese Aid Policy," *The Pacific Review* 29, 1 (2016): 21-44. DOI: 10.1080/09512748.2015.1066414
- Woods, Ngaire. "Whose aid? Whose influence? China, Emerging Donors and the Silent Revolution in Development Assistance," *International Affairs* 84, Issue 6 (November 2008): 1205–1221. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2346.2008.00765.x>
- You, Woong-Jo. "An Empirical Study on Korean ODA Policy." *World Regional Studies Review (in Korean)* 29, 1 (2009) : 34–58.
- Zhou, Hong Jun Zhang and Min Zhang. *Foreign Aid in China*. Springer: New York, 2015